

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 562 / Akuntansi

DOSEN PEMULA



**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI
(PENDEKATAN RESEARCH and DEVELOPMENT STUDI KASUS KOPERASI
PEGAWAI KOPERTIS WILAYAH 7 SURABAYA)**

TIM PENELITI

- 1) Ketua : Tony Soebidjono,SE.,SH.,M.Ak
NIDN : 07031273302
- 2) Anggota : Lilis Binawati,SE.,M.Ak
NIDN : 0720056903
- 3) Anggota : Martinus Sony Erstiawan,S.E.M.S.A
NIDN : 0710037902

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA
DESEMBER 2016**

DOSEN PEMULA



**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI
(PENDEKATAN RESEARCH and DEVELOPMENT STUDI KASUS KOPERASI
PEGAWAI KOPERTIS WILAYAH 7 SURABAYA)**

TIM PENELITI

- 1) Ketua : Tony Soebidjono,SE.,SH.,M.Ak
NIDN : 07031273302
- 2) Anggota : Lilis Binawati,SE.,M.Ak
NIDN : 0720056903
- 3) Anggota : Martinus Sony Erstiawan,S.E.M.S.A
NIDN : 0710037902

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA
DESEMBER 2016**

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PROGRAM HIBAH PENELITIAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 026/ST-PPM/KPJ/VII/2016**

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Tutut Wurijanto, M.Kom**

: Kepala Bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM) Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, yang dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Hibah Penelitian Internal Tahun Anggaran 2016 yang didanai Lembaga Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Tony Soebijono, SE., SH., M.Ak.**

: Peneliti tahun anggaran 2016. Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai anggota peneliti sebagai berikut :

- Lilis Binawati, S.E., M.Ak.
- Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat dan bekerjasama untuk menyelesaikan semua kegiatan Program Hibah Penelitian Internal Tahun Anggaran 2016 Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

PIHAK PERTAMA memberi kepercayaan dan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut sebagai ketua pelaksana program Hibah Penelitian Internal dengan judul: **"Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi Wanita (Pendekatan Research and Development Studi Kasus Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita diSurabaya)"**

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan Hibah Penelitian Internal kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp5,500,000,- Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran secara bertahap kepada PIHAK KEDUA, yaitu termin pertama sebesar 50% Rp. 2,750,000,- diberikan setelah penandatanganan surat perjanjian ini, termin kedua sebesar 20% Rp. 1,100,000,- diberikan setelah laporan kemajuan pelaksanaan dan laporan penggunaan keuangan 70% diterima oleh bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM), termin ketiga sebesar 30% Rp. 1,650,000,- diberikan setelah laporan akhir, seminar, *log book*, laporan keuangan dan bukti publikasi dijurnal nasional diterima oleh bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM).

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan tugas program Penelitian Hibah Bersaing selambat-lambatnya pada tanggal **2 Desember 2016**. Kelalaian atas kewajiban pengumpulan pada tanggal tersebut menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya.

HEART & ~~PIHAK PERTAMA~~ dapat melakukan kegiatan: (1) Melakukan pemantauan, (2) Melakukan evaluasi internal, (3) Melakukan audit penggunaan anggaran. Pihak KEDUA wajib memperlancar kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib Menyelesaikan:

- Laporan Kemajuan (*Progress Report*) sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **7 September 2016**
- Seminar Laporan Akhir mulai **Oktober 2016** (Jadwal Seminar menyesuaikan).
- Laporan Akhir setelah diseminarkan dikumpulkan sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **2 Desember 2016**
- Laporan Penggunaan Keuangan 100%, sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **2 Desember 2016**
- Catatan Harian (*Log Book*) sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling lambat **2 Desember 2016**
- *Softcopy* Laporan Akhir & Laporan Penggunaan Keuangan dalam bentuk *pdf* dikirim ke lppm@stikom.edu, paling lambat **2 Desember 2016**
- **Publikasi hasil penelitian di jurnal Nasional & Bukti pemuatan publikasi Ilmiah**, paling lambat **2 Desember 2016**

Demikian surat perjanjian dibuat, dipahami bersama dan dilaksanakan.

Pihak Pertama,



Tutut Wurijanto, M.Kom

Surabaya, 15 Juli 2016

Pihak Kedua,



Tony Soebijono, SE., SH., M.Ak.

Halaman Pengesahan Penelitian Dosen Pemula

Judul :

*Analisis Good Corporate Governance pada Koperasi
(Pendekatan Research and Development studi kasus Koperasi Pegawai Kopertis Wilayah 7
Sumbawa)*

Kode Nama Rumpun Ilmu : 562/Akuntansi

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Tony Soebijono, S.E.,S.H., M.Ak
NIDN : 07031273302

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Program Studi : Akuntansi

No HP/Email : 081287778669

Anggota Peneliti.1

Nama Lengkap : Lilis Binawati,SE.,M.Ak
NIDN : 0720056903

Anggota Peneliti.2

Nama Lengkap : Martinus Sony Erstiawan,SE.,MSA
NIDN : 0710037902

Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya

Mengetahui,
Kepala Lembaga Penelitian

Tutut Wurijanto,M.Kom
NIK : 900036

Surabaya, 21 Desember 2016
Yang Menyatakan,



Tony Soebijono,SE,SH.,M.Ak
NIK : 050521

RINGKASAN

Koperasi merupakan usaha mandiri sekumpulan orang yang memiliki prinsip kekeluargaan, keterbukaan dan adil bagi anggota yang berperan dalam pengembangan koperasi yang bersifat sukarela menjadi salah satu anggota. Koperasi berlandaskan UUD Republik Indonesia dengan tujuan koperasi untuk memberdayakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan bermuara dalam koperasi. Koperasi tidak serta merta semuanya dapat berkembang dengan baik, permasalahan demi permasalahan diantaranya orientasi strategi dalam menggerakkan koperasi masih kurang yang konsisten dalam menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang kerja dan usaha.

Pengelolaan koperasi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh koperasi Indonesia diantaranya tidak memiliki kekuatan anggota dalam menentukan arah koperasi, tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki anggota yang kompeten dalam bidang manajemen, tidak memiliki tata kelola yang baik dan kualitas koperasi masih beragam didalam pengembangan strategi kerjasama dengan pihak luar dan pihak lain bahkan kinerja manajemen yang masih kurang. Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur organisasi, peran dan aturan yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan *jobdesk* dari para pengurus, pengawas dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola (*Good Corporate Governance*) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang harus menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada *Shareholders* dan seluruh *stakeholder* dan harus mampu bekerjasama dengan *stakeholders* dalam mencapai tujuan perusahaan.

Dalam mendukung visi dan misi serta perkembangan Koperasi saat ini masih diperlukan tata kelola yang baik dalam mengelola koperasi secara transparan, pertanggungjawaban, independen, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan sehingga hasil akhir dalam perkembangannya dimasa yang akan datang dapat lebih banyak memiliki berbagai jenis usaha dan dapat berkembang dalam memberikan pelatihan bagi kader-kader diberbagai wilayah. Usaha dalam mendukung proses pengembangan Koperasi diperlukan tata kelola yang baik dalam mengimplementasikan kualitas manajeman yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari Ketua Koperasi sampai dengan para anggota koperasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola koperasi yang memiliki daya saing dalam pengembangan dan pelebaran usaha memiliki peran penting bagi koperasi, oleh sebab itu penilaian dan penerapan tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan guna menghasilkan pengambilan keputusan oleh *stakeholder* dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan Penelitian	3
1.4	Urgensi Penelitian / Luaran	3
1.5	Kontribusi Penelitian terhadap Peningkatan Mutu	4
1.6	Rencana Target Luaran	4
BAB II	Tinjauan Pustaka	
2.1	Pembangunan Perekonomian Indonesia	5
2.2	Koperasi	5
2.3	Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi	6
2.4	Perkembangan Koperasi diIndonesia	6
2.5	Perangkat dan Keanggotaan Koperasi	7
2.6	<i>Good Corporate Governance</i>	8
2.7	Pilar <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.8	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.9	Tujuan dan Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	10
2.10	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	10
2.11	Elemen Pendukung Efektifitas <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.12	Koperasi dan <i>Good Corporate Governance</i>	11
BAB III	Metode Penelitian	
3.1	Jenis Penelitian	13
3.2	Strategi Pengumpulan Data	13
3.3	Sumber Data dan Teknik Penentuan Data	16
3.3.1	Sumber data	16
3.3.2	Teknik Penentuan Data	16
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	18
3.5	Teknik Analisis Data	18
3.6	Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.7	Uji Instrumen	22
3.7.1	Validitas Data	22
3.7.2	Realibilitas Data	24
3.8	Langkah – Langkah Pembahasan	24
3.8.1	Teknik Pembuatan Skala	24
3.9	Kerangka Konseptual	26
BAB IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1	Profil Company	27
4.2	Deskripsi Data	33
4.2.1	Deskripsi Data Responden	34
4.2.2	Deskripsi Pendidikan Terakhir	34

4.2.3	Deskripsi Status Pekerjaan	34
4.2.4	Deskripsi Lamanya Menjadi Anggota Koperasi	34
4.3	Hasil Penelitian	
4.3.1	Pembahasan dan Analisis Data	36
4.3.1.1	Transparansi	36
4.3.1.2	Independensi	37
4.3.1.3	Akuntabilitas	37
4.3.1.4	Responsibilitas	38
4.3.1.5	Fairness	39
4.4	Analisis Aspek-Aspek <i>Good Corporate Governance</i>	40
4.4.1	Transparansi	40
4.4.2	Independensi	42
4.4.3	Akuntabilitas	44
4.4.4	Responsibilitas	46
4.4.5	Fairness	48
4.5	Penilaian Aspek <i>Good Corporate Governance</i>	50
BAB V	Penutup	
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	51
Daftar Pustaka	53
Lampiran		

Lampiran :

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti	56
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul	57

Susunan Organisasi Tim Peneliti**Ketua Tim**

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lengkap | : | Tony Soebijono, S.E.,S.H., M.Ak. |
| b. Jenis Kelamian | : | Pria |
| c. NIP | : | 050521 |
| d. Displin Ilmu | : | Akuntansi |
| e. Golongan/Pangkat | : | Asisten Ahli |
| f. Jabatan | : | Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi Fungsional/Struktural |
| g. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi/Akuntansi |
| h. Waktu untuk Penelitian ini | : | 12 jam/minggu |

Anggota Tim. 1

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lengkap | : | Lilis Binawati |
| b. Jenis Kelamian | : | Wanita |
| c. NIP | : | 050508 |
| d. Displin Ilmu | : | Akuntansi |
| e. Golongan/Pangkat | : | Asisten Ahli |
| f. Jabatan | : | Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi Fungsional/Struktural |
| g. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi/Akuntansi |
| h. Waktu untuk Penelitian ini | : | 12 jam/minggu |

Anggota Tim. 2

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lengkap | : | Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA. |
| b. Jenis Kelamian | : | Pria |
| c. NIP | : | 150848 |
| d. Displin Ilmu | : | Akuntansi |
| e. Golongan/Pangkat | : | Asisten Ahli |
| f. Jabatan | : | Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi Fungsional/Struktural |
| g. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi/Akuntansi |
| h. Waktu untuk Penelitian ini | : | 12 jam/minggu |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran koperasi disektor perekonomian dapat menumbuhkan minat tenaga kerja manusia untuk berkarya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Koperasi merupakan usaha mandiri sekumpulan orang yang memiliki prinsip kekeluargaan, keterbukaan dan adil bagi anggota yang berperan dalam pengembangan koperasi yang bersifat sukarela ketika menjadi salah satu anggota. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 (satu) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan ayat 4 (empat) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam Sukidjo (2008) mengatakan bahwa pemerintah harus memainkan peran yang aktif untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi agar dapat menjadi sektor ekonomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian nasional.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 sejumlah 143.117 dan tahun 2014 berjumlah 147.249 dari jumlah tersebut artinya dengan bergantinya tahun jumlah koperasi meningkat sebesar 4.132. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam mendampingi dan memberdayakan serta mengembangkan kelembagaan dengan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi yang disebut di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 62 tentang perkoperasian. Menurut sudarto (2015) mengatakan bahwa peran pemerintah perlu dipertajam dalam membina koperasi melalui perencanaan pembangunan khususnya meningkatkan apresiasi dan minat masyarakat Indonesia dalam berkoperasi.

Koperasi berlandaskan UUD Republik Indonesia dengan tujuan koperasi untuk memberdayakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan bermuara dalam koperasi. Koperasi tidak serta merta semuanya

dapat berkembang dengan baik, permasalahan demi permasalahan diantaranya orientasi strategi dalam menggerakkan koperasi yang masih kurang konsisten dalam menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang kerja dan usaha.

Pengelolaan koperasi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh koperasi Indonesia diantaranya tidak memiliki kekuatan anggota dalam menentukan arah koperasi, tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki anggota yang kompeten dalam bidang manajemen, tidak memiliki tata kelola yang baik, dan kualitas koperasi masih beragam dalam pengembangan strategi kerjasama dengan pihak luar dan pihak lain, bahkan kinerja manajemen yang masih kurang. Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur organisasi, peran dan aturan yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan *jobdesk* dari para pengurus, pengawas dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola (*Good Corporate Governance*) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang harus menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada *Shareholder* (Pemegang Saham) dan seluruh *stakeholder* (Pengguna). *Stakeholder* harus mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan.

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi *stakeholder* serta *shareholder*. Seperti Puspitasari dan Ludigdo (2016) mengatakan bahwa penyelenggaraan tata kelola yang tidak diselenggarakan dengan baik dapat menimbulkan lemahnya sistem pengendalian internal seperti pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, maupun praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Prijambodo dalam Puspitasari dan Ludigdo (2016) kondisi ini menunjukkan organisasi masih terkelola oleh orang atau bersifat subyektif, serta masih terkelola dengan sistem yang bisa menghambat terlaksananya tujuan. Peran *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan sehingga kinerja organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran menciptakan tata kelola yang baik. Peran masyarakat pun

dapat menjadi bagian pengembangan prioritas bisnis dengan dapat mendengarkan keluhan, dapat secara langsung berinteraksi kepada masyarakat. Peran sistem informasi dapat menyediakan pelayanan serta informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan anggota, dalam memperoleh hasil kerja yang lebih konsisten, dan dapat mengoptimalkan keuntungan dalam berbisnis, serta memudahkan perolehan informasi yang akurat dan memadai sehingga tercipta kepercayaan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat.

Dalam mendukung visi dan misi serta perkembangan Koperasi di Indonesia khususnya Surabaya, saat ini masih diperlukan tata kelola yang baik dalam mengelola koperasi secara transparan, pertanggungjawaban, independen, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan sehingga hasil akhir dalam perkembangannya dimasa yang akan datang dapat lebih banyak memiliki berbagai jenis usaha dan dapat berkembang dalam memberikan pelatihan bagi kader-kader diberbagai wilayah. Usaha dalam mendukung proses pengembangan Koperasi diperlukan tata kelola yang baik dalam mengimplementasikan kualitas manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari Ketua Koperasi sampai dengan para anggota koperasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dihadapi yaitu bagaimana penilaian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi (Studi kasus pada Koperasi di Surabaya).

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Mengkaji implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi di Surabaya.
- b) Mengkaji penilaian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi di Surabaya.

1.4 Urgensi Penelitian / Luaran

Tata kelola koperasi yang memiliki daya saing dalam pengembangan dan pelebaran usaha memiliki peran penting bagi koperasi, oleh sebab itu penilaian dan penerapan

tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan guna menghasilkan pengambilan keputusan oleh *stakeholder* dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Kontribusi penelitian terhadap Peningkatan Mutu

1.) Pendidikan

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi dunia pendidikan dengan menemukan penilaian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) menghasilkan sistem informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.) Non Kependidikan

Untuk mengetahui penilaian dari pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi yang akan dapat digunakan sebagai perbaikan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

1.6 Rencana Target Luaran

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional		Ekonomi / Draff
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Nasional	Draff
		Lokal	Terdaftar
3	Buku Ajar		Tidak ada
4	Luaran Lainnya Jika ada		Tidak ada
5	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKI)		Tidak Ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Perekonomian Indonesia

Menurut Bannock (2004) dalam wikipedia menjelaskan bahwa proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan menghitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi dalam hal ini lebih memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup sebagai wadah usaha bersama yang menjadi kebijakan perkoperasian yang harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang makin dinamis dan penuh tantangan.

2.2 Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3 Fungsi, peran dan prinsip Koperasi Indonesia

Pelaksanaan koperasi terdapat fungsi dan peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, diantaranya a.) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, b.) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, c.) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya, d.) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan prinsip koperasi diantaranya a.) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b.) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, c.) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, d.) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, e.) Mandiri. Pengembangan koperasi dapat melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi.

Ciri koperasi menurut Susanto (2015) diantaranya (a) koperasi merupakan kumpulan beberapa orang dan bukan kumpulan modal. (b) Semua kegiatan yang terjadi didalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial, (c) Kegiatan yang terjadi didalam koperasi didasari pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar intimidasi, ancaman atau campur tangan dari berbagai pihak lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. (d) Tujuan pada koperasi intinya adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama para anggotanya.

2.4 Perkembangan Koperasi diIndonesia

Menurut Tambunan (2008) Kegiatan koperasi yang diselenggarakan saat ini dilakukan karena berasal dari dorongan pemerintah bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan dimulai sejak tgl. 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman ditanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan,

kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi (Sutrisno. 2003) dalam Tambunan (2008).

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan diIndonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa indonesia. Didalamnya terkandung *survive*, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong) dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Menurut Merza (2006) dalam Tambunan (2008) keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar terutama pemerintah masih sangat besar.

2.5 Perangkat dan Keanggotaan Koperasi

Penyelenggaraan koperasi sejauh ini terdapat perangkat organisasi yang diperlukan pengelolaan koperasi yang baik menurut Tejo (2008) terdapat pada rapat anggota yang merupakan wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. Pengurus merupakan anggota yang dibentuk oleh rapat anggota dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus bertanggungjawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus

dapat mengangkat manager untuk mengelola koperasi. Pengawas merupakan anggota yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi dirapat anggota.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Bab IV tentang Perangkat koperasi Pasal 21 menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pasal 22 tentang rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

2.6 Good Corporate Governance (GCG)

Santosa (2008) GCG merupakan suatu system pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang tersinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier dan *stakeholder*. GCG menurut Rahmat dan Saraswati (2013) mengatakan bahwa GCG merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang. Fokus Akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (*Stakeholder*), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCGI) dalam Retno dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa *Cadbury Comimitee* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan formulasi *Center for European Policy Studies* (CEPS) tentang GCG, menyatakan bahwa GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses adalah mekanisme dari hak-hak tersebut, sedangkan pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

2.7 Pilar Good Corporate Governance

Menciptakan pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan dibutuhkan pilar yang mendukung penerapan GCG dalam KNKG (2006) diantaranya a.) Negara dan perangkatnya sebagai regulator, b.) Dunia usaha sebagai pelaku pasar, c.) Masyarakat sebagai pengguna.

Dari ketiga pilar tersebut menurut KNKG (2006) terdapat prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar diantaranya : (1.) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten; (2.) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha; (3.) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pilar yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggungjawab.

2.8 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2006) Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

Prinsip GCG dalam Kaihatu (2006) antara lain : 1.) *Transparency* (Keterbukaan Informasi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.; 2.) *Accountability* (Akuntabilitas) merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3.) *Responsibility* (Pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, 4.) *Independency* (kemandirian) merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5.) *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

2.9 Tujuan dan Manfaat penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Aldridge dan Sutojo dalam Ferlinda (2008) Tujuan penerapan GCG yaitu : (a.) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, (b.) Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham, (c.) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, (d.) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of Director dan manajemen perusahaan dan (e.) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan. Sedangkan manfaat GCG menurut Wati (2012) diantaranya a.) perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survei CGPI berlangsung. b.) peningkatan kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep CG yang dilakukan perusahaan, c.) Peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan *stakeholder* terhadap pentingnya GCG dalam pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang berkelanjutan. d.) pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi diperusahaan dalam penerapan GCG sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan. e.) *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) saat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengekuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip GCG. f.) Perwujudan komitmen dan tanggungjawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

2.10 Mekanisme GCG

Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi menurut

Arifin (2005) dalam Purno (2013). Buediono (2005) dalam Purno pun mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Lain halnya Lastanti (2004) dalam Purno (2013) mengatakan bahwa mekanisme pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok diantaranya mekanisme internal dan eksternal. Pada mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara memperengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.

2.11 Elemen Pendukung Efektivitas *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Iskandar dan Suryono (2015) *Good Corporate Governance* pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial belaka.

2.12 Koperasi dan *Good Corporate Governance*

GCG tidak hanya berperan dalam pengembangan perusahaan yang memiliki badan hukum baik dari pemerintahan atau pun dari perusahaan perseroan. Prinsip GCG secara langsung dapat menjadi bagian dalam pengembangan bidang apapun untuk mencapai kondisi perusahaan yang berkembang dan dapat bersaing dengan tata kelola yang baik. Pengurus koperasi, anggota serta masyarakat dapat menggunakan prinsip keterbukaan informasi mengetahui kondisi, keputusan, perkembangan koperasi, rencana pengembangan koperasi dan lain-lain. Prinsip akuntabilitas dimana para masyarakat dapat secara langsung memahami fungsi, tanggungjawab, *job desk* melalui struktur organisasi, sistem yang dimiliki dan perkembangannya, serta pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh anggota koperasi. Pada prinsip

pertanggungjawaban koperasi dapat menerapkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan pemerintah yang berlaku termasuk pada unsur pajak, ketenaga kerjaan, jaminan keuangan, kesehatan dan keselamatan kerja. Pada prinsip kemandirian, pengelolaan koperasi dapat dikelola dengan baik dan profesional dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Prinsip kesetaraan serta kewajaran pada koperasi yang dikelola unsur perlakuan dan kepentingan diberi perlakuan yang sama tanpa perbedaan SARA, kondisi fisik maupun gender sehingga diharapkan koperasi dapat lebih berkembang dan berdaya saing.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian *Research and Development* (R&D) merupakan penelitian pengembangan pada sebuah produk untuk menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono. 2011). Dalam hal ini produk yang dimaksud adalah koperasi yang merupakan koperasi yang masih dapat mengembangkan anggota dan usaha sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas bukan hanya anggota koperasi itu sendiri, namun dapat mensejahterakan masyarakat sekitar koperasi.

3.2 STRATEGI PENGUMPULAN DATA

a.) Survey pendahuluan dan survey dokumen

1.) Survey pendahuluan dalam menginterpretasikan sebuah ketertarikan untuk melakukan penelitian dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada koperasi awal mulanya berasal dari jurnal-jurnal penelitian baik yang berkaitan dengan ilmu akuntansi maupun berkaitan dengan koperasi dilanjutkan dengan membaca majalah, skripsi, tesis, buku literatur, koran (media massa cetak) dan disertasi. Informasi yang digunakan tidak hanya yang disebutkan sebelumnya namun peneliti mengembangkan pencarian informasi melalui pendapat para ahli, dokumen pemerintah, dengan mendownload melalui penggunaan website berupa www.dinkop-umkm.surabaya.go.id atau www.dinkop-umkm.surabaya.go.id, www.ssrn.com, www.detik.com, www.bisnis.com, www.kompas.com, www.tempo.co, dan lain sebagainya yang mendukung pemahaman peneliti dan tertarik untuk melanjutkan dalam bentuk

penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kondisi dilapangan terkini. Selanjutnya peneliti mencari informasi tentang koperasi yang dapat dijadikan sebagai obyek penelitian dan peneliti terfokus pada koperasi yang akan dijadikan obyek penelitian.

Langkah awal peneliti yang dilakukan sebelum pemilihan topik adalah survey terlebih dahulu. Survey dapat dilakukan melalui literatur-literatur, narasumber praktisi, proyeksi konstruksi dan konsultasi serta sharing dengan rekan dosen. Survey dilakukan di lingkungan BUMN diantaranya Koperasi.

Secara umum survei dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni:

- 1) Menentukan masalah penelitian ;
- 2) Membuat desain survei ;
- 3) Mengembangkan instrumen survei;
- 4) Menentukan sampel;
- 5) Melakukan pre-test;
- 6) Mengumpulkan data;
- 7) Memeriksa data (editing);
- 8) Mengkode data;
- 9) Data entry;
- 10) Pengolahan dan analisis data;
- 11) Interpretasi data; dan
- 12) Membuat kesimpulan serta rekomendasi (Yusuf, I.A, 2011).

A.) **Identifikasi masalah.** Setelah survey tersebut, maka akan dilakukan identifikasi masalah dari keseluruhan masalah yang ditemukan pada saat survey. Dari proses identifikasi inilah, penulis akan menemukan topik permasahan khusus yang dikaji lebih spesifik, sehingga permasalahan yang di fokuskan adalah penilaian implementasi *Good Corporate Governance* pada Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Kopertis Wilayah VII)”.

B.) **Penetapan topik.** Setelah proses identifikasi maka output yang dihasilkan adalah satu buah permasalahan yang akan penulis kaji lebih

spesifik. Kemudian satu topik permasalahan tersebut akan penulis angkat menjadi satu topik/tema yaitu *Good Coorporate Governance*.

- C.) **Penentuan tujuan.** Setelah topik dirumuskan, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan tujuan/output akhir dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi *Good Corporate Governance*.
- 2.) Survey dokumentasi dilakukan ke obyek observasi dengan mengamati dokumen berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya AD/ART, prinsip koperasi diantaranya keanggotaan yang bersifat sukarela, pengelolaan yang bersifat demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), kerjasama antar koperasi, hak dan kewajiban pengurus, sistem pelaporan secara manual maupun secara yang terkoneksi dengan internet, dan lain lain yang diperlukan didalam penelitian ini.
- b.) Survey lapangan**
- Dilaksanakan dengan datang ke koperasi untuk secara langsung berinteraksi serta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa cara yaitu :
- 1.) Observasi, merupakan pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan untuk mengamati secara langsung pada obyek yang diteliti. Observasi juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra (Bungin, 2007:115). Observasi dilakukan berkaitan dengan pengumpulan bukti dalam mendukung hasil wawancara. Observasi juga melakukan pengamatan dari obyek yang diamati secara langsung.
 - 2.) Quisioner, merupakan penggunaan angket dengan menyerahkan kepada anggota dan pengurus koperasi yang dapat digunakan bilamana mengetahui penerapan GCG yang merupakan alat pertanggungjawaban Koperasi dengan disebarluaskan berbagai pertanyaan yang dapat menjadi sebagai wakil disetiap aspek yang menjadi obyek peneliti. Quisioner menggunakan skala ordinal dimana dalam merespon quisioner menggunakan skala linkert yaitu diantaranya Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

- 3.) Wawancara. Dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan melakukan depth interview kepada anggota dan pengurus yang tidak mengisi angket kuisioner. Pertanyaan yang dilakukan menggunakan angket kuisioner sebagai dasar pertanyaan dan pertanyaan dapat berkembang dengan sendirinya dalam mengungkap kejadian dan kondisi sebenarnya menurut kebiasaan responden.

3.3 SUMBER DATA DAN TEKNIK PENENTUAN DATA

3.3.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer

a.) Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:137) merupakan sumber data yang dapat diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Dengan cara penyebaran angket kuisioner dan melakukan wawancara (*Depth Interview*) secara langsung kepada pihak yang berhubungan dengan konteks penelitian diantaranya adalah pengurus dan anggota, data primer dilakukan kepada pengurus dan pengelola koperasi.

b.) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:137) merupakan sumber data yang tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Dengan cara melalui dokumen atau dapat melalui pihak lain yang masih berhubungan, berupa AD/ART koperasi, dokumen anggota koperasi, Laporan Keuangan.

3.3.2 Teknik Penentuan Data

Penentuan data dalam mendukung dan menunjang hasil penelitian yang baik dilakukan dengan cara populasi dan sampel. Berdasarkan kedua cara tersebut dapat dijelaskan :

a.) Populasi

Wilayah yang melalui generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan dapat diambil kesimpulan. Menurut Sugiyono (2010:80). Populasi dalam hal ini yaitu pengurus, pengawas dan anggota koperasi dengan jumlah kurang lebih 143 Orang.

b.) Sampel

Menurut Sugiyono (2010:81) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Probability Sampling dimana sistem pengambilan sampling tidak memberi kesempatan yang sama bagi tiap unsur atau anggota populasi yang dipilih. Namun untuk lebih baik pengambilan *sampling purposive* dimana teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan untuk menghitung, masuk dalam kategori *Stratified Random Sampling Proportional* (Slovin:1998)

Berdasarkan populasi dan sampel dapat menggunakan rumus :

$$n = N / (1 + N e^2)$$

dimana :

n : jumlah minimal sampel yang diperlukan

n_1 : Populasi Pengurus

n_2 : Populasi Anggota

N : Jumlah populasi

E : *Error bound* yang ditoleransi

$$\text{Jumlah } n = 143 / (1 + 143 \times 0.1^2) = 143 / 2.34 = 58.85$$

Sehingga jumlah data yang ditentukan berjumlah 59 data.

Penentuan Populasi

Pengurus (N_1) = 8

Anggota (N_2) = 135

Penentuan Sampel Pengurus

$$n_i = n_i / N \times n$$

Sampel Pengurus

$$N_i = 8 / 143 \times 59 = 3$$

Penentuan Sampel Pengurus

$$N_2 = n_2 / N \times n$$

Sampel Anggota

$$N_i = 135 / 143 \times 59 = 56$$

Adapun total kuesioner yang disebar 75 kuesioner untuk menghindari kekurangan data akibat salah pengisian atau kuesioner tidak kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sudah tercukupi. Data dari hasil survei pendahuluan akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan untuk apakah tiap pertanyaan mewakili elemen penelitian yang dimaksud, sedangkan pengujian reliabilitas adalah untuk menguji apakah beberapa pertanyaan ini reliabel antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain untuk satu elemen penelitian yang sama. Proses penyusunan kuesioner sampai dengan pengujian validitas dan reliabilitas akan dilakukan terus sampai didapatkan kuesioner yang benar, yaitu yang telah memenuhi pengujian validitas dan reliabilitas.

3.4 Variabel-variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Identifikasi Variabel

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menghindari ketidakjelasan makna variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional untuk masing-masing variabel:

Kriteria dan prinsip yang digunakan dalam interpretasi temuan penelitian berdasarkan prinsip GCG KNKG (2006) :

- 1.) **Transparansi (*Transparency*).** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengembalian keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan yang akan digunakan dalam angket maupun wawancara diantaranya :

- a.) Transparansi pengungkapan laporan keuangan kepada anggota koperasi dalam menentukan SHU
- b.) Transparansi prosedur dan kebijakan dalam penyajian laporan keuangan kepada ketua/pengurus/anggota
- c.) Transparansi laporan keuangan koperasi dapat dipercaya oleh ketua/pengurus/anggota
- d.) Kebijakan yang diambil pengurus secara tertulis dan proposisional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan
- e.) Ketua/pengurus/anggota berpegang pada pedoman etika perilaku sebagai anggota koperasi
- f.) Pengelolaan Koperasi turut peduli dalam tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar.
- g.) Pengurus koperasi menjamin tanggungjawab terhadap anggota dan pemegang modal
- h.) Pengurus dan pengelola koperasi memiliki kepedulian dan tanggungjawab kepada kelestarian lingkungan dan aspek lingkungan hidup

2.) Akuntabilitas (*Accountability*). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pertanyaan yang akan digunakan dalam angket maupun wawancara diantaranya :

- a.) Struktur organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara etis.
- b.) Dilakukan peninjauan dan pengevaluasian kinerja operasional

- c.) Dilakukan pengawasan kinerja operasional dalam pertanggungjawaban usaha
- d.) Ketua/pengurus/anggota berkepentingan terhadap peningkatan SHU dan produk yang ditawarkan
- e.) Koperasi itu sendiri yang bertanggungjawab dalam kedudukannya dalam suatu badan hukum
- f.) Tanggungjawab pengurus tidak terbatas
- g.) Penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya tidak hati-hati menjadi tanggungjawab bersama
- h.) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Rapat Anggota Tahunan

3.) **Responsibilitas (Responsibility).** Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Pertanyaan yang akan digunakan dalam angket maupun wawancara diantaranya :

- a.) Keputusan pengurus diambil secara efektif dan tepat yang dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pengurus dan anggota
- b.) Koperasi merupakan wadah pengembangan potensi diri dalam hal kemandirian
- c.) Koperasi berdiri tanpa intervensi pihak lain
- d.) Koperasi merupakan organisasi yang otonom dan independen
- e.) Koperasi mampu mengelola usaha secara efektif dan efisien
- f.) Koperasi bermuara pada kesejahteraan anggota, pengelola dan pengurus yang bersifat kekeluargaan dan berwatak sosial
- g.) Benturan kepentingan atau unsur kepentingan pribadi antara ketua koperasi/ pengurus/ anggota/pengelola dalam bisnis yang bersaing dikoperasi itu sendiri

4.) **Independensi.** Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pertanyaan yang akan digunakan dalam angket maupun wawancara diantaranya :

- a.) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- b.) Pengurus bersifat independen terhadap kepengurusan
- c.) Independen dan Transparansi digunakan dalam pemilihan ketua serta pengurus
- d.) Rapat Anggaran Tahunan (RAT) dan Rapat Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKRAPB) dilakukan untuk dapat merencanakan perolehan pendapatan lain dari koperasi.
- e.) Ketua/pengurus memiliki pedoman kerja sebagai panduan pelaksanaan tugas dan wewenang dan kepatuhan
- f.) Independensi dalam modal dari anggota

5.) Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*). Dalam melaksanakan kegaitannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pertanyaan yang akan digunakan dalam angket maupun wawancara diantaranya :

- a.) Membedakan penerimaan anggota dari unsur SARA
- b.) Pengelolaan koperasi memiliki wewenang dalam memberikan saran dan pendapat secara tertulis yang disampaikan kepada Rapat Anggota
- c.) Hasil audit eksternal dalam pelaporan keuangan yang diberikan oleh konsultan wajar tanpa pengecualian
- d.) Koperasi meningkatkan value dan meningkatkan citra kepada publik dalam jangka panjang
- e.) Koperasi dibangun dengan tingkat kredibilitas dimata anggota, mitra dan stakeholder
- f.) Sumber daya yang ada dikoperasi dapat dimanfaatkan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, mengurangi biaya yang tidak efisien dan efektif.
- g.) Peningkatan kinerja Struktur organisasi berfungsi secara optimal berdasarkan standar kinerja perangkat koperasi.

3.6 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kopertis Wilayah VII (KPRI Kopertis Wilayah VII).

3.7 Uji Instrumen

3.7.1 Validasi Data

Sebelum angket kusioner disebar, dapat diuji coba instrumen (pertanyaan/indikator) pada responden. Sehingga pertanyaan yang diajukan pada angket dapat mudah dimengerti oleh responden dan dapat mengetahui durasi mengisi angket.

Validitas merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan instrumen (Suharsimi.2002). suatu instrumen dapat dikatakan memiliki tingkat kevalidan yang tinggi, mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p value*) dengan signifikan 0,05 atau 5% yang dihitung berdasarkan bantuan SPSS. Jika probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan instrumen valid namun sebaliknya bila > dari 0,05 dikatakan tidak valid.

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas *Transparansi*

NO	Pertanyaan	R Tabel	Kriteria
1	0,53	0,361	Valid
2	0,71	0,361	Valid
3	0,52	0,361	Valid
4	0,65	0,361	Valid
5	0,55	0,361	Valid
6	0,44	0,361	Valid
7	0,77	0,361	Valid
8	0,58	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas berkaitan dengan transparansi dari 8 (delapan) pertanyaan dapat dikatakan valid dan bisa digunakan

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas *Akuntabilitas*

NO	Pertanyaan	R Tabel	Kriteria
1	0,71	0,361	Valid
2	0,76	0,361	Valid
3	0,45	0,361	Valid
4	0,65	0,361	Valid
5	0,5	0,361	Valid
6	0,48	0,361	Valid
7	0,41	0,361	Valid
8	0,55	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas berkaitan dengan Akuntabilitas dari 8 (delapan) pertanyaan dapat dikatakan valid dan bisa digunakan

Tabel 3.3
Hasil Validitas *Responsibility*

NO	Pertanyaan	R Tabel	Kriteria
1	0,63	0,361	Valid
2	0,65	0,361	Valid
3	0,42	0,361	Valid
4	0,47	0,361	Valid
5	0,55	0,361	Valid
6	0,59	0,361	Valid
7	0,59	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas berkaitan dengan Responsibility dari 7 (Tujuh) pertanyaan dapat dikatakan valid dan bisa digunakan

Tabel 3.4
Hasil Validitas *Independensi*

NO	Pertanyaan	R Tabel	Kriteria
1	0,42	0,361	Valid
2	0,52	0,361	Valid
3	0,64	0,361	Valid
4	0,42	0,361	Valid
5	0,47	0,361	Valid
6	0,51	0,361	Valid
7	0,54	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas berkaitan dengan Independensi dari 7 (Tujuh) pertanyaan dapat dikatakan valid dan bisa digunakan

Tabel 3.5
Hasil Validitas Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

NO	Pertanyaan	R Tabel	Kriteria
1	0,43	0,361	Valid
2	0,51	0,361	Valid
3	0,59	0,361	Valid
4	0,58	0,361	Valid
5	0,84	0,361	Valid
6	0,54	0,361	Valid
7	0,6	0,361	Valid

Berdasarkan uji validitas berkaitan dengan Fairness (Kewajaran dan kesetaraan) dari 7 (Tujuh) pertanyaan dapat dikatakan valid dan bisa digunakan

3.7.2 Realibilitas Data

Merupakan instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang cukup baik (Suharsini. 2006).

3.8 Langkah-langkah Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan langkah-langkah pembahasan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengamatan dan wawancara apakah implementasi *Good Corporate Governance* pada objek penelitian telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara NOMOR: PER-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Menguji keefektifan implementasi *Good Corporate Governance* pada objek penelitian. Keefektifan diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a.) Independensi (*independency*)
 - b.) Transparansi (*transparency*)
 - c.) Responsibilitas (*responsibility*)
 - d.) Akuntabilitas (*accountability*)
 - e.) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

3.8.1 Teknik pembuatan skala

Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dengan model pengukuran ordinal menggunakan skala likert. Ukuran dalam model ini meliputi ukuran ordinal dan ukuran nominal. Ukuran ordinal merupakan angka yang diberikan dimana angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Ukuran nominal digunakan untuk mengurutkan obyek dari tingkatan terendah sampai tertinggi. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap obyek, tetapi hanya memberikan urutan tingkatan dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi saja.

**Tabel 3.1
Nilai Tingkatan**

Nilai	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Ragu – Ragu (Netral)
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sedangkan nilai absolut yang merupakan nilai model maturity dapat dicermati dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2
Tabel Nilai Model Maturity**

Nilai	Keterangan
0	Tidak ada-(<i>Non Existental</i>)
1	Inisialisasi-(<i>Initial</i>) / Ad-Hoc,
2	Pengulangan-(<i>Repeatable but Intuitive</i>)
3	Terdefenisi-(<i>Defined</i>)
4	Dikelola-(<i>Managed and Measurable</i>)
5	Optimalisasi-(<i>Optimised</i>)

**Tabel 3.3
Indikator dan skala pengukuran**

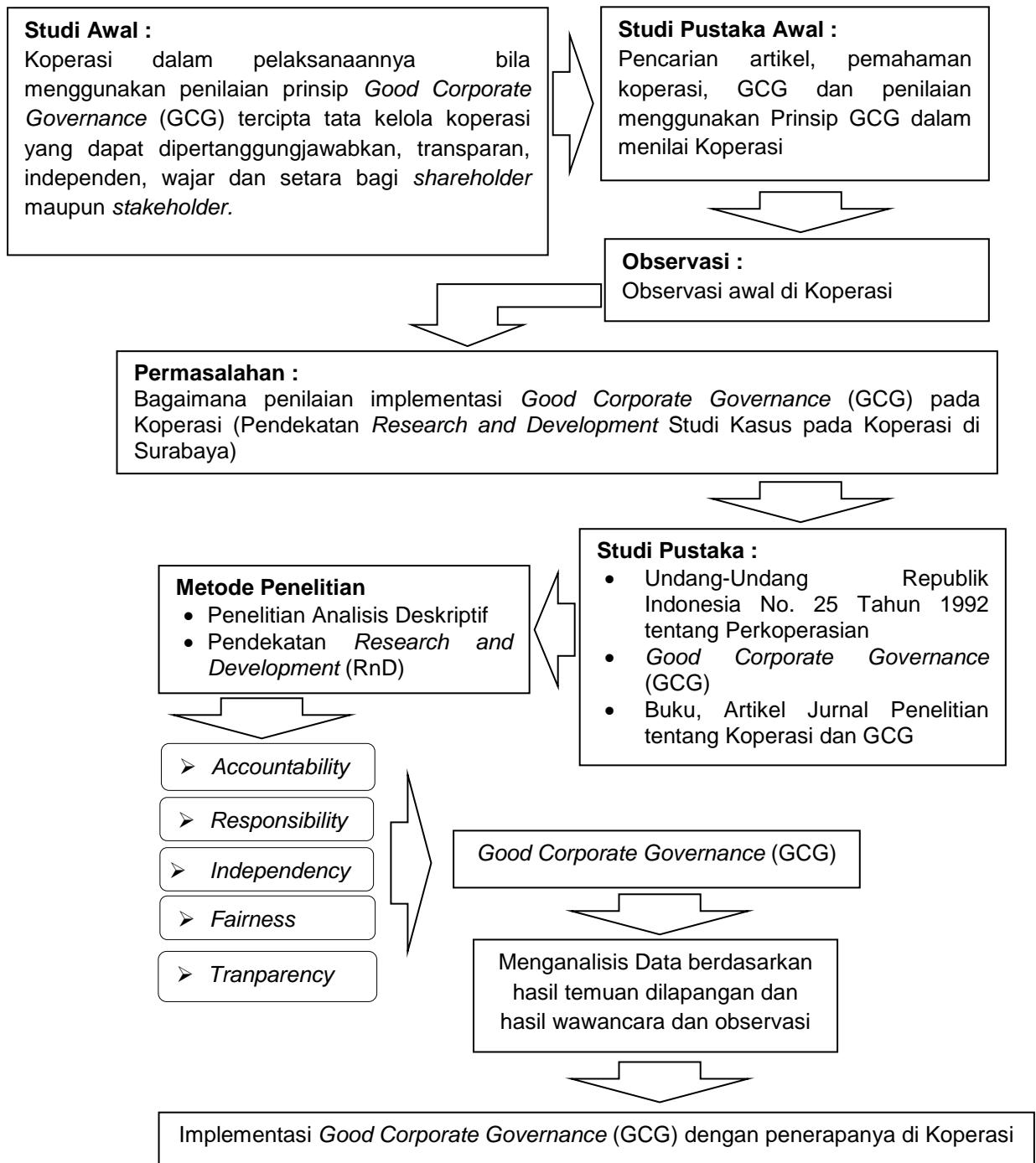
Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Perwujudan Good Corporate Governane	a) Independensi (<i>independency</i>) b) Trasparansi (<i>transparency</i>) c) Responsibilitas (<i>responsibility</i>) d) Akuntabilitas (<i>accountability</i>) e) Kewajaran dan Kesetaraan (<i>fairness</i>)	Ordinal	Kuesioner

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat dilalsifikasikan secara umum, yaitu:

**Tabel 3.4
Skala Pembulatan Indeks**

Skala Pembulatan	Kriteria
0.0 - 0.50	0 = Tidak ada-(<i>Non Existental</i>)
0.51 - 1.50	1 = <i>Good Corporate Governance</i> Tidak Terwujud
1.51 - 2.50	2 = <i>Good Corporate Governance</i> Kurang Terwujud
2.51 - 3.50	3 = <i>Good Corporate Governance</i> Terlaksana
3.51 - 4.50	4 = <i>Good Corporate Governance</i> Cukup Terwujud
4.50 - 5.00	5 = <i>Good Corporate Governance</i> Sangat Terwujud

3.9 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Company

Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan organisasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari Koperasi Primer sampai tingkat induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yang berperan dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan nasional serta amanat yang diemban oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

VISI

Menjadi Koperasi yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri

MISI

- Bersikap adil dan demokratis, serta bekerja secara transparan dan akuntabel
- Meningkatkan mutu pelayanan dan berusaha memenuhi kebutuhan anggota
- Mampu menghadapi tantangan

Sejarah singkat berdirinya KPRI Kopertis Wilayah VII :

Berdiri	: 27 April 1983
Pendiri	: Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro L.B Alit., S.H
	Drs. R. Soekardi
	Drs. Soeharsono
	Drs. Mustika Artha
Badan Hukum	: No. 5488/BH/II/1983
Tgl.	: 05 September 1983

Identitas KPRI Kopertis Wilayah VII

Nama Koperasi : KP-RI Kopertis Wilayah VII
 No. Badan Hukum : 5488/BH/II/1983
 Tanggal : 05 September 1983
 Alamat : Jl. Arief Rachman Hakim 103 Surabaya
 Telpon : 031-5939703
 Nomor SIUP : 99/R/K/13/21/XI/1983
 Tanggal : 16 Mei 2013
 NO. NPWP : 01.497.227.7.606.000

Perubahan Anggaran Dasar KP-RI Kopertis Wilayah VII :

- Perubahan Anggaran Dasar yang pertama (pengesahan dari Menteri Koperasi) :

Tanggal : 18 Maret 1996
 Disahkan oleh Menteri Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil
 No : 1214/PAD/KWK.13/5.1/96
 Tanggal : 31 Oktober 1996
- Perubahan Anggaran Dasar yang pertama (Pengesahan dari Rapat Anggota Khusus KPRI) :

Disahkan oleh Rapat Anggota Khusus KP-RI Kopertis Wilayah VII
 No : 043/SK/KP-RI/2003
 Tanggal : 30-Desember-2003
- Perubahan Anggaran Dasar yang Kedua

Disahkan oleh Rapat Anggota Khusus KP-RI Kopertis Wilayah VII
 Nomor : 03/BA/KP-RI/KOP-7/XII/2015
 Tanggal : 5 Desember 2015

Landasan dan Asas KP-RI Kopertis Wilayah VII :

(Perubahan AD Bab III Pasal 3)

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas Asas kekeluargaan

Tujuan KP-RI Kopertis Wilayah VII :

(Perubahan AD Bab III Pasal 4)

KP-RI Kopertis Wilayah VII bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota beserta keluarga pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peran dan Prinsip KP-RI Kopertis Wilayah VII

(BAB IV Pasal 5 Perubahan AD)

- i. Sebagaimana sarana (wahana) pembinaan, pembimbingan dan penggerak insan Koperasi dikalangan pegawai Republik Indonesia dalam lingkungan/wilayah Kantor Kopertis Wilayah VII
- ii. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- iii. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat.

**Susunan Pengurus dan Pengawas KP-RI Kopertis Wilayah VII
(Periode 2014 – 2016)**

Penasehat :

1. Koordinator Kopertis Wilayah VII : Prof. Dr. H. Sugijanto,MS,Apt

Pengurus :

1. Ketua Umum : Sulaksono, SH.,MH
2. Ketua I : Dra. Soffia Pudji Estiasih, MM
3. Sekretaris : Drs. Aris Hargiyanto
4. Bendahara I : Dra. Kurnia Agustina Anggraeni, AK, MM
5. Bendahara II : Ratna Dwi Anggarwati, S.Sos

Pengawas :

1. Koordinator : Dr. Amurti Kusmaningtyas,SH.,MM (2012 – 2014)
2. Anggota I : R. Erdiyanto W.SE, MSA,Ak (2013 – 2015)
3. Anggota II : Drs. Ec. Sudaryanto, MM (2014 – 2016)

Keanggotaan

Keanggotaan KP-RI Kopertis Wilayah VII, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :

1. Anggota Biasa

Merupakan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kopertis Wilayah VII yang terdiri dari :

- a. PNS Administrasi yang setiap hari berkantor di Kantor Kopertis
- b. PNS Tenaga Edukatip (Dosen) yang dipekerjakan pada PTS yang tersebar diseluruh Jawa Timur

2. Anggota Luar Biasa

Merupakan Dosen DPK dan Tenaga Administrasi yang telah pensiun atau pindah dari Kopertis Wilayah VII tetapi masih berkeinginan menjadi anggota Koperasi

3. Anggota Kehormatan

Merupakan anggota diluar anggota biasa dan luar biasa, akrena jasanya terhadap koperasi maka diangkat menjadi Anggota Kehormatan. Pengangkatan anggota kehormatan dilakukan melalui Rapat Pengurus serta ketentuan yang berlaku.

Modal Koperasi

A. Modal Sendiri

Merupakan modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang terdiri dari :

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Dana Cadangan
- Hibah

B. Modal Pinjaman

C. Modal yang berasal dari modal penyertaan

Produk dan Layanan Jasa

Dalam perkembangannya yaitu sesuai dengan pengembangan jumlah anggota, permodalan, kebutuhan anggota dan lain-lain, maka unit usaha KP-RI Kopertis Wilayah VII meliputi :

a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Merupakan Core Bussiness KP-RI Kopertis Wilayah VII yang memberikan kontribusi untuk melayani kebutuhan para anggota. Hal ini ditunjukkan dari permintaan pinjaman uang dan barang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

b. Unit Usaha Toko

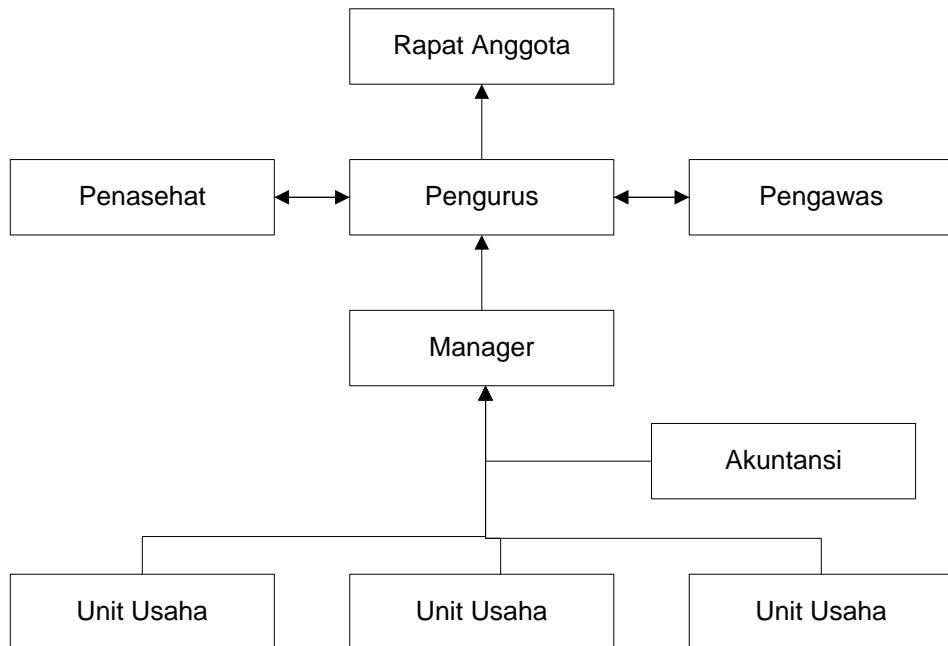
Memiliki lokasi yang strategis dan emmiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Sampai saat ini keberadaan toko KP-RI Kopertis Wilayah VII sangat membantu kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitar.

c. Unit Layanan Tiket Kereta Api Online

d. Unit Usaha Lain.

Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang diamanahkan sesuai dengan tujuan, fungsi, peran dan prinsip KP-RI Kopertis Wilayah VII tersebut pada anggaran Dasar, serta guna menyelaraskan sesuai dengan undang-undang No. 25 Tahun 1992, maka pengurus, pengawas dan karyawan serta perwakilan Anggota KP-RI Kopertis Wilayah VII memiliki struktur Organisasi KP-RI untuk bertugas dilapangan dalam pengelolaan koperasi.

Struktur Organisasi



Penjelasan dalam struktur organisasi :

Rapat anggota koperasi dilakukan setahun sekali diantaranya Rapat Anggota Koperasi Tahunan (RAT) dilakukan Bulan Maret dan Rapat Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKRAPB) dilakukan oleh pengurus koperasi pada bulan Desember untuk menentukan rencana kerja yang dilakukan oleh pengurus untuk tahun berikutnya.

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota merupakan wadah berkumpulnya sebuah forum yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota yang ada namun mengingat anggota tersebar di beberapa kota diprovinsi Jawa Timur maka dapat diwakilkan dan RAT dilakukan setahun sekali.

Rapat anggota tahunan dapat membahas diantaranya :

- 1.) Menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu
- 2.) Menetapkan kebijakan pengurus dalam tahun buku yang akan datang.
- 3.) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja pada tahun depan.

2. Penasehat

Merupakan menampung aspirasi dalam pengembangan organisasi, pemberian arah kebijakan, memberi masukan, penasehat dalam visi misi organisasi dan AD/ART.

3. Pengawas

Mengurangi penyelewengan dan pencegahan kepada para pengurus dan pengelolaan koperasi berdasarkan kebijakan dan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Disesuaikan dengan Pasal 38 Undang-undang no. 25 tahun 1992 :

- 1.) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota
- 2.) Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota
- 3.) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pengawas bertugas dan berwenang :

- a.) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b.) Membuat laporan tertulis tentang pengawasannya
- c.) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- d.) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

4. Pengurus

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Kepengurusan mengikuti Pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pengurus bertugas dan memiliki wewenang :

- a.) Mengelola koperasi dan usahanya
- b.) Mengajukan rangcangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c.) Menyelenggarakan rapat anggota
- d.) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e.) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f.) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Wewenang pengurus :

- a.) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- b.) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar
- c.) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

5. Manager

Bertugas mengembangkan koperasi yang diangkat oleh para pengurus koperasi untuk pengelolaan harian koperasi, merekrut karyawan, melakukan pembinaan kepada karyawan dan mengawasi secara langsung kinerja dari karyawan. Koordinasi berkaitan dengan anggaran kerja dimasa yang datang dan mengkoordinir secara administratif berkaitan data, keuangan, stock barang dagang, jujur, dapat bertanggungjawab. Dan menyampaikan kepada pihak pengurus dalam laporan pertanggungjawaban laporan dalam usaha yang dikelolanya.

4.2 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kuisioner kepada 75 (Tujuh Puluh Lima) responden yaitu kepada pengurus, anggota dan pengawas Koperasi Pegawai Kopertis wilayah 7 Jawa Timur. Berikut dijelaskan pembagian angket kuisioner dalam penelitian ini :

Tabel 4.1

Pengembalian angket Kuisioner

KET	JUMLAH	PROSENTASE
Angket Kuisioner yang dikirim	75	100%
Angket yang tidak kembali	7	12%
Angket yang kembali	68	88%
Angket Kuisioner yang pengisinya tidak lengkap	3	8%
Kusioner yang dapat diolah	65	80%

4.2.1 Deskripsi Responden

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Pria	42
Wanita	23
Jumlah	65

4.2.2 Deskripsi Pendidikan terakhir

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD/Sederajat	-
2	SMP/Sederajat	-
3	SMA/SMK/STM/Sederajat	10
4	Diploma	15
5	Sarjana (S-1)	27
6	Strata Dua (S-2)	13
7	Lain-Lain...	
	Total	65

4.2.3 Deskripsi Status Pekerjaan

Tabel 4.4
Status Pekerjaan

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah
1	Honorer	5
2	Gol-I	15
3	Gol-II	19
4	Gol-III	21
5	Gol-IV	5
	Total	65

4.2.4 Deskripsi lamanya menjadi anggota koperasi

Tabel 4.5
Lamanya menjadi Anggota

No	Berdasarkan Lama Menjadi Anggota	Jumlah
1	0 - 1 Tahun	0
2	1 - 3 Tahun	5
3	3 - 5 Tahun	12
4	5 - 10 Tahun	16
5	> 10 Tahun	32
	Total	65

4.3 Hasil Penelitian

Dengan melakukan penelitian pada kegiatan koperasi yang bertujuan untuk mengkaji implementasi *Good Corporate Governance* pada koperasi pegawai kopertis wilayah 7 dengan melakukan wawancara kepada pengurus dan menyebar kuisioner kepada anggota sebagai dasar penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi *Good Corporate Governance*. Maka diperoleh informasi dari hasil pengumpulan data sebagai berikut :

Dalam penelitian ini tidak semua data yang didapatkan dari hasil pengisian kuisioner oleh responden dikatakan layak untuk diproses lebih lanjut. Data dari hasil penyebaran kuisioner dikatakan tidak layak, jika ada butir pertanyaan yang tidak dijawab atau pengisiannya tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Sehingga data kuisioner tersebut tidak dapat diolah lebih lanjut. Jika semua butir pertanyaan yang ada dijawab sesuai dengan cara pengisian kuisioner, maka data kuisioner tersebut dikatakan layak sehingga dapat diolah lebih lanjut.

Dari 75 kuisioner yang disebar, terdapat 65 kuisioner yang layak untuk diolah pada proses selanjutnya maupun yang tidak layak.. Hasil pemetaan ini dapat dijadikan dasar bagi pihak manajemen untuk mengukur proses yang ada saat ini dan mencari tahu apa yang diperlukan untuk meningkatkannya. Hasil ringkasan kuisioner dapat dilihat pada tabel 4.5

**Tabel 4.5
Ringkasan Hasil Kuesioner**

Lingkup	Jumlah Jawaban	Jumlah Pertanyaan	Indeks	Tingkat Model
Independen	26	7	3.71	4
Transparansi	26	8	3.25	3
Responsibilitas	17	7	2.71	3
Akuntabilitas	24	8	3.00	3
Kewajaran & Kesetaraan	24	7	3.43	3

Berdasarkan hasil rekapan angket kuisioner tersebut tingkat model angka 3 lebih banyak dihasilkan berdasarkan indeks masing-masing lingkup GCG.

4.3.1 Pembahasan dan Analisis Data

Penilaian berdasarkan perwujudan implementasi *Good Corporate Governance*. (GCG) dari hasil penyebaran angket kusioner

4.3.1.1 Transparansi

Tabel 4.6
Rekapitulasi Jawaban Kusioner - Transparansi

Jawaban	Pertanyaan No.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	4	61	0	13	0	0	7
3	10	59	3	52	27	3	0	56
4	53	2	1	11	25	49	60	2
5	2	0	0	2	0	13	5	0

	Pertanyaan No.								Total Nilai
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Jawaban Terbanyak	4	3	2	3	3	4	4	3	26
Jumlah Pertanyaan	8								
Indeks	3,25								(Total Nilai / Jumlah Pertanyaan)
Std. Deviasi	1,8								

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh presentasi secara keseluruhan sama dengan indeks 3,25 dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi dapat terlaksana dengan baik.

Prinsip transparansi koperasi pegawai kopertis wilayah 7 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi yang dimiliki oleh KNKG dimana dalam melakukan transparansi atas informasi yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu dan dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Langkah transparansi dapat mendukung kebijakan dan pedoman yang baik dimana semua unsur (pengurus) dapat mengkondisikan dan mengembangkan koperasi dengan terus melakukan pengembangan usaha dan dapat dinikmati oleh seluruh anggota dengan menyampaikan secara jelas dan transparansi berkaitan dengan kondisi keuangan, strategi perusahaan, SHU anggota.

4.3.1.2 Independensi (Kemandirian)

Tabel 4.7
Rekapitulasi Hasil Kuisisioner – Independensi

Jawaban	Pertanyaan No.						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	14	6	19	0	0
3	9	20	38	54	34	6	1
4	50	24	11	5	11	39	9
5	4	21	2	0	1	20	55

Berdasarkan hasil perhitungan angket kuisioner dengan nilai indeks 3,71 dengan tingkat *model maturity* dan kriteria 4 maka dapat dikatakan *good corporate governance* cukup terwujud dan dapat dikelola dengan baik.

Pada prinsip GCG menurut KNKG agar dapat melaksanakan dan dikelola dengan baik pihak yang terkait dalam hal ini pengurus, anggota dan pengelola secara independen melaksanakan tugas dan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain, bebas benturan kepentingan, dan bebas tekanan. Dengan begitu koperasi dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai Rapat Anggaran Tahunan (RAT) dan Rapat Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKRAPB) untuk dapat dilakukan atas rencana yang disusun.

4.3.1.3 Tanggungjawab (Akuntabilitas)

Tabel 4.8
Rekapitulasi Hasil Angket Kusioner - Akuntabilitas

Berdasarkan hasil angket kuisioner dengang prinsip GCG mengenai akuntabilitas dengan mengajukan 8 (Delapan) pertanyaan dengan total nilai berdasarkan jawaban terbanyak berjumlah 24 dan memiliki indeks 3,00. Dari hasil tersebut menurut kriteria berada pada nilai 3 yaitu terdefinisi dengan kriteria dapat terlaksana dengan baik.

Prinsip akuntabilitas yang terdapat dikoperasi dimana pengurus dan anggota memiliki tanggungjawab masing-masing yang secara transparan diatur dalam AD/ART dan dikerjakan serta dilakukan secara wajar sehingga kesinambungan dan perkembangan koperasi dapat serta merta melayani masyarakat dengan toko serba guna dengan harga yang lebih murah dibanding mini market.

4.3.1.4 Responsibilitas (Responsibility)

Tabel 4.9
Rekapitulasi Angket Kuisioner – Responsibilitas

Jawaban	Pertanyaan No.						
	1	2	3	4	5	6	7
1	16	0	4	0	0	0	0
2	46	7	15	54	0	0	0
3	3	58	2	7	8	33	14
4	0	0	0	0	54	30	41
5	0	0	0	0	3	2	10

Dari hasil rekapitulasi angket quisioner tentang Responsibilitas terhadap koperasi dimana jawaban terbanyak dengan total nilai 19 (Sembilan Belas) dalam jumlah pertanyaan 7 (tujuh) dan hasilnya berupa nilai indeks dengan jumlah 2,71.

Berdasarkan prinsip GCG tentang Responsibilitas dimana perusahaan (koperasi) harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara keberlangsungan hidup secara *continue* (terus menerus) demi masa depan dan perkembangan koperasi dan tetap menjadi motor penggerak bagi masyarakat dalam memajukan perekonomian.

4.3.1.5 Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Tabel 4.10
Rekapitulasi Angket Kuisioner – Fairness

Jawaban	Pertanyaan No.						
	1	2	3	4	5	6	7
1	13	0	0	0	0	0	0
2	52	2	4	0	0	0	3
3	0	58	60	0	7	4	56
4	0	5	1	4	57	57	6
5	0	0	0	61	1	4	0

	Pertanyaan No.							Total Nilai
	1	2	3	4	5	6	7	
Jawaban Terbanyak	2	3	3	5	4	4	3	24
Jumlah Pertanyaan	7							
Indeks	3,43		(Total Nilai / Jumlah Pertanyaan)					
Std Deviasi	1,85							

Dari hasil rekapitulasi angket kuisioner berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) dengan 7 (tujuh) pertanyaan dengan jawaban terbanyak dengan total nilai 24 (Dua Puluh Empat) memiliki indeks 3,43. Dari hasil tersebut menurut tingkat Model Maturity dan kriteria terletak diangka 3 (tiga) yaitu terdefinisi dan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan prinsip Fairness (Kewajaran dan kesetaraan) menurut KNKG dimana koperasi senantiasa memperhatikan kepentingan anggota berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dimana koperasi dapat memberikan kesempatan pada anggota untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap

perubahan yang terjadi dalam koperasi berdasarkan informasi yang ada dan menyampaikan secara transparan kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan.

4.4 Analisis Aspek-Aspek Good Corporate Governance

4.4.1 Transparansi

Perwujudan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Koperasi Karyawan Kopertis Wilayah 7 telah bersifat terbuka terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor akuntan Publik (KAP), berdasarkan pasal 30 UU.No.25 1992 sebelum laporan keuangan diaudit oleh KAP *pasal d* menjelaskan pengurus dapat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan *ayat e* pengurus menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris yang dilakukan secara tertib dengan dilakukannya audit atas laporan keuangan yang dilakukan KAP maka dapat menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan diantaranya pengurus, anggota koperasi investor maupun kreditor, serta prinsip koperasi ini telah menyelenggarakan sesuai dengan Pasal 40 dalam UU No. 25 tahun 1995 dimana koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus bendahara I Ibu Kurnia :

“Transparansi berkaitan dengan laporan keuangan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sejak 8 tahun yang lalu hingga sekarang saat itu masih diketuai oleh Bapak Yosua yang sekarang Rektor Universitas Widya Kartika hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh KAP diungkap secara transparan kepada para pengurus. Pada saat Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan bulan maret KAP tidak hadir dan segala pertanyaan yang terjadi berkaitan dengan keuangan disampaikan secara transparan oleh pengurus. Pedoman Kerja pengurus sesuai dengan AD/ART. Masyarakat bisa melakukan pembelian pada usaha koperasi hanya tidak bisa melakukan simpan pinjam, bagi anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam dalam pengembalian pinjamannya akan langsung dipotong dari gaji untuk melunasi.”

Sedangkan hasil wawancara dengan manager yang mengelola toserba (Toko Serba ada) Bapak Ari :

“Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. AD/ART merupakan pedoman kerja para pengurus dan tugas anggota yang diatur dan

disesuaikan dengan UU No. 25 Tahun 1992. Usaha Koperasi yang ada tidak menutup diri bagi masyarakat sekitar, masyarakat dapat membeli dan membayar barang atau pembayaran PLN, pulsa elektronik maupun tiket kereta yang berhubungan langsung dengan server PT. KAI. Masyarakat sekitar tidak dapat melakukan simpan pinjam hanya diperbolehkan membeli barang yang tersedia diswalayan.”

Prinsip dasar transparansi berkaitan dengan kualitas yang disajikan berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pengurus dan anggota koperasi dalam transaparansi pengelolaan keuangan dan pembagian SHU yang diberikan kepada anggota. Pasal 30 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang isinya dapat menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, untuk itu transparansi dilakukan dalam mengembangkan secara khusus dokumentasi sistem informasi akuntansi sehingga transparansi dalam pengambilan kebijakan telah disesuaikan dengan prosedur dan kebijakan yang ada (Arifin.2005). Sedangkan menurut Ludigdo dan Puspitasari (2013) penyediaan transparansi dengan kemudahan akses dan dapat dipahami berasal dari informasi dan kebijakan dalam perusahaan (koperasi).

Menurut Tadikapurry (2011:63) wujud nyata transparansi dalam mendukung GCG diantarnya keterbukaan dalam hal rapat-rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Dan berdasarkan Prinsip KNKG (2006) yang sebagai pedoman pelaksanaan GCG telah disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan serta laporan keuangan oleh kopertis dimana informasikan disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Visi dan Misi Koperasi Pegawai Kopertis wilayah 7 terdapat sikap yang dijunjung tinggi oleh para pengurus dan anggota dengan “Bersikap adil dan demokratis, serta bekerja secara transparan dan akuntabel”. Dari misi yang ada terlihat bahwa bersama-sama memiliki rasa tanggungjawab, disiplin, transparan, jujur dan menambah kualitas dalam hal kebersamaan memajukan koperasi yang dapat menjadi bagian dari mewujudkan implementasi misi dan visi dimana para anggota dan pengurus berusaha mewujudkan “menjadi Koperasi yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri”. Kerjasama dan penyampaian informasi

(komunikasi) yang baik antara anggota dan pengurus dalam mewujudkan visi dan misi sebagai koperasi dapat mengubah kinerja yang terlibat dalam pengelolaan koperasi agar dapat berjalan dengan baik, dapat menjadi bagian dalam pengembangan dan dapat dilakukan bersama-sama.

Dalam mendukung informasi yang terdapat pada sistem kerja (*job desk*) yang diatur pada AD/ART dan dijabarkan tiap bagian pengurus dan anggota yang mana manusia yang melakukan pekerjaan dalam proses keberlangsungan hidup koperasi dan tanpa didukung oleh teknologi (mesin) data yang diproses serta pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan komunikasi antar lini yang dilakukan akurat, tepat waktu, dapat bandingkan berdasarkan karakteristik PSAK serta dapat diakses oleh seluruh anggota dan pengurus merupakan haknya.

Kepedulian koperasi pada masyarakat sekitar dengan membuka usahanya kepada masyarakat luas, namun ada hal yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat luas dimana masyarakat hanya diperbolehkan melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan ditoko koperasi, namun ada pembatasan sebagai anggota dan bukan sebagai anggota, sebagai anggota dapat diperkenankan untuk simpan pinjam dan membeli di swalayan dan dapat melakukan simpan pinjam bagi yang membutuhkan tentunya harus menjadi karyawan kopertis wilayah 7, dan bila bukan anggota hanya dapat melakukan kegiatan transaksi ditoko swalayan tersebut karena terdapat resiko bila bukan karyawan kopertis yang melakukan simpan pinjam.

4.4.2 Independensi

Prinsip independensi dapat dikatakan mandiri dalam pengelolaannya yang sejalan berdasarkan visi menjadi koperasi yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri. Serta berdasarkan Undang-undang yang berlaku dimana berdasarkan Pasal 42 pada UU No. 25 tahun 1992 menerangkan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, berdasarkan kutipan tersebut bahwa kemandirian koperasi dapat dikelola secara independen dan *survive* dengan organisasinya sendiri sehingga tidak ada intervensi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dari segala tekanan atau pengaruh dari pihak lain baik dari internal maupun dari eksternal, sehingga dalam pengambilan keputusan

dilakukan secara obyektif (KNKG.2006). Fungsi pengurus berdasarkan tugasnya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terdapat pada AD/ART dengan penugasan melakukan RAT dan RKRAPB.

Kemandirian koperasi dapat terlihat dari kemampuan koperasi dalam menghimpun modal yang berasal dari para anggota, koperasi dikembangkan dari, oleh dan untuk anggota. Anggota harus membiayai setiap kebutuhan investasi dalam pengembangan usaha apalagi harus mengendalikan organisasinya dan memanfaatkan pelayanan koperasi (Sugiyanto,2013). Kemandirian koperasi memerlukan kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan usaha dan menghasilkan laba yang tinggi. Tidak hanya kreativitas diperlukan, para pengurus dan anggota tentunya memerlukan terobosan yang inovatif dengan bekerja sama dengan pihak instansi swasta untuk dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak luput pula dalam pengembangan koperasi pengurus perlu mengikuti pendidikan tentang koperasi dan bekerja sama antar koperasi, sebagai dasar pemahaman konsep dasar secara mendalam dan cara kerja koperasi mengembangkan diri dalam memperoleh keuntungan (laba) dan dapat mengelola koperasi dengan baik.

Pengelolaannya dilakukan secara gotongroyong dan bersama-sama mewujudkan koperasi yang profesional, berdiri sendiri (otonom) dan bersifat independen serta dukungan oleh pengurus (perangkat koperasi) yang intens dan fokus dalam pengembangan berdasarkan Undang-undang no. 25 tahun 1992. Independen tersebut menurut Ibu Kurnia selaku Pengurus Bendahara sebagai berikut :

“Koperasi ini dapat dikatakan mandiri karena koperasi pegawai ini yang telah menjadi PNS secara otomatis akan menjadi anggota koperasi, untuk tenaga honorer belum menjadi anggota koperasi karena belum ada penetapan menjadi PNS dari pemerintah. Modal berasal dari sumbangan anggota yang dipotong gaji setiap bulan. Dalam perjalanannya waktu dan koperasi ingin mengembangkan usaha karena modal dari anggota minim terpaksa hutang ke Bank Danamon Syariah sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah dengan durasi angsuran dilunaskan selama 1 tahun. Rapat Anggaran Tahunan (RAT) dilakukan bulan Maret dan Rapat Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKRAPB) dilakukan bulan Desember untuk merencanakan pengembangan usaha dan rencana kerja tahun 2017. 2 (dua) kali kepengurusan terjadi pembatalan pemilihan ketua koperasi dikarena berbagai alasan sehingga pemilihan ketua dilakukan secara aklamasi dan penunjukkan

langsung sehingga dalam melakukan pergantian pengurus tidak dilakukan secara demokrasi karena alasan tertentu.

Pada prinsip koperasi yang terdapat dari pasal 5 ayat b pada UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis dapat menampung berbagai saran dan ungkapan serta kepedulian anggota dalam mengembangkan koperasi secara bersama-sama tanpa intervensi pihak lain dan secara bersama-sama mencari modal dari para anggota dan bekerja untuk menaikkan profit dan kesejahteraan anggota. Menurut Permeneg BUMN tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pasal 3 ayat 4 mengatakan bahwa tata kelola yang baik dapat dikelola dengan profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola. Dengan prinsip independensi pengelolaan koperasi dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan tanggungjawab serta kemandirian pengurus koperasi.

4.4.3 Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban struktur organisasi yang secara etis dikerjakan dalam kepengurusan setiap periode dan setiap tahun dalam rapat tahunan, seperti yang dikutip oleh Prinsip GCG menurut KNKG disampaikan bahwa perusahaan (koperasi) dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar serta dikelola dengan benar, terstruktur sesuai dengan kepentingan pemegang saham (anggota koperasi) maupun kepentingan lain (investor). Struktur organisasi diatur didalam AD/ART dapat menjelaskan tugas, fungsi tiap perangkat organisasi. Kesesuaian perangkat organisasi dan tugas serta fungsi telah diatur juga pada pasal 21 dimana perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan perkumpulan seluruh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi untuk menetapkan anggaran dasar diperlukan rencana kerja tahun depan, mengatur kebijakan-kebijakan dari permasalahan yang terjadi dilapangan dengan mengatur kebijakan dengan dikondisikan pada kasus yang ada baik dibidang usaha koperasi itu sendiri, keorganisasian serta manajemen itu sendiri.

Prinsip akuntabilitas yang digunakan untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, pembagian SHU dan penggabungan, pembagian dan peleburan koperasi merupakan kegiatan yang telah diatur dalam AD/ART dan telah diatur menurut Undang-undang. Tidak hanya itu saja dengan adanya kegiatan tiap periode rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Prinsip akuntabilitas menurut bu kurnia selaku pengurus sebagai berikut :

“Struktur organisasi koperasi sudah diatur dalam AD/ART mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 1992, tidak ada perubahan dalam tugas pokoknya. Laporan pertanggungjawaban tiap tahun dilaksanakan pada saat RAT yang dilakukan bulan Maret yang dihadiri oleh seluruh anggota maupun perwakilan anggota. Perwakilan anggota hanya dikhususkan pada dosen yang bertugas diluar kota surabaya biasanya mengirim 1 – 2 orang yang kebetulan ada perlu dikantor atau kondisi tidak mengajar. Pada saat rapat anggota biasanya jika ada hal yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan, penggunaan keuangan walaupun sudah diaudit oleh kantor akuntan publik namun ada yang bertanya dan setelah dijelaskan oleh kami (pengurus) mereka cukup dapat memaklumi. Akuntan publik tidak ikut pada saat RAT, laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, pengurus yang harus mempelajari apabila ada pertanyaan, pertanyaannya paling hanya sekitar kegiatan dan yang ada dilaporan pertanggungjawban pengurus. Sejauh ini penyalahgunaan uang organisasi tidak ada hanya dengan berkembangnya teknologi mulai ada beberapa yang nakal contohnya gaji yang ditransfer dapat secara online diketahui,, 1 jam kemudian uang telah diambil dari ATM, padahal orang tersebut seharusnya dipotong dengan angsuran, pinjaman pokok dll. Dan saat ini sudah diberlakukan pemotongan langsung angsuran maupun pinjaman yang ada.

Prinsip akuntansi menurut Pak Ari sebagai pengelola toko serba ada dan yang mengikuti RAT, sebagai berikut :

“Job desk dari pengurus sudah diatur dalam AD/ART yang mengacu pada UU No. 25 tahun 1992. Diluar itu AD/ART dikembangkan oleh pengurus maupun anggota yang disesuaikan dengan kondisi dikopertis. Contoh SHU prinsip nominal persentasenya sama dengan Undang-undang, prinsip pinjaman pokok, pinjaman wajib juga sama. Pertanggungjawaban dan evaluasi kerja pengurus dilakukan pada saat RAT.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pertanggungjawaban kerja pengurus telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Dimana AD/ART mengacu pada undang-undang perkoperasian dan pertanggungjawaban disampaikan pada

rapat anggota tahunan (RAT) seperti yang telah diulas bahwa rapat tertinggi pada koperasi dilakukan pada saat RAT. Menurut prinsip GCG Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pasal 3 diatur mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Berdasarkan peraturan menteri BUMN tersebut diakui bahwa anggota sebagai pemilik koperasi dan pengawas menginginkan pertanggungjawaban yang secara transparan dapat disampaikan dengan baik tanpa ditutup-tutupi.

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang dapat mengendalikan hubungan antar bagian dan unit-unit yang ada dengan pemberdayaan pengurus dengan dimonitoring langsung oleh pengawas dan anggota koperasi, dievaluasi dan dikendalikan oleh RAT dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi. Prinsip akuntabilitas menjadi prinsip perusahaan dalam sebuah misi untuk berkembang, buniyi Misi yang dimiliki koperasi berbunyi bersikap adil dan demokratis serta bekerja secara transparan dan akuntabel. Menurut pedoman pelaksanaan GCG KNKG kewajiban yang harus dilakukan oleh koperasi adalah rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan dan strategi. Dari sudut pandang dan penilaian akan misi yang dimiliki bahwa koperasi ini telah mewujudkan visi dan misi tersebut dalam kehidupan dalam berorganisasi sehingga dimana akan datang tetap terus dapat semakin sehat, mandiri dan akuntabel serta berkembang.

4.4.4 Responsibility

Prinsip *responsibility* merupakan dasar hukum aturan yang menjadi bagian dalam berkembangnya koperasi karyawan. Dengan prinsip-prinsip koperasi menjadikan badan usaha yang beranggotakan seorang atau lebih berdasarkan atas kekeluargaan. Prinsip responsibility pada koperasi diatur pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang prinsip koperasi yang berbunyi prinsip koperasi diantaranya (1.) keanggotaan bersifat sukarela, (2.) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, (3.) pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota (4.) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Sifat sukarela menjadi anggota terbuka

bagi siapa saja hanya dalam hal ini koperasi pegawai kopertis 7 membatasi keanggotaannya dikarenakan terdapat sebab diantaranya bila anggota koperasi yang menjadi pegawai kopertis namun masih berstatus honorer yang belum menjadi PNS, batasan itu yang menjadi alasan pegawai honorer bukan menjadi anggota koperasi. Disebutkan koperasi dilaksanakan secara demokratis sudah sesuai dengan visi dan misi koperasi pegawai kopertis 7, dimana hak suara dalam melaksanakan rapat dapat diwakilkan setiap RAT. Berdasarkan prinsip koperasi yang dimiliki merupakan perihal yang diperlukan didalam organisasi dan merupakan dasar pendirian koperasi menjadikan dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Prinsip *Responsibilitas* dapat juga dikembangkan pada setiap anggota masyarakat yang sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip responsibilitas yang terdapat pada pedoman GCG dimana perusahaan (Koperasi) harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini koperasi yang ada telah memenuhi aturan yang berlaku yaitu peraturan koperasi. Pada pedoman pokok pelaksanaan GCG mengenai responsibilitas perusahaan (koperasi) harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar. Dan perusahaan (koperasi) harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan perduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Prinsip responsibilitas menurut bu kurnia sebagai pengurus sbb :

“sejauh ini tanggungjawab sosial kepada masyarakat hanya pada toko serba ada yang dibuka untuk umum. Rencana kerja pengelola toko serba ada tahun ini menjadikan toko bisa dipasang AC (Air Conditioner) sudah mau habis tahun kami tagih ke pengelola akhirnya sekarang dipasang AC.”

Sedangkan prinsip responsibilitas menurut pak Ari sebagai pengelola toko serba ada sbb :

“kita membuka toko serba ada tidak hanya untuk anggota karyawan, masyarakat bisa beli dengan harga yang tidak begitu mahal, awalnya membuka toko hanya dikhkususkan anggota saja”.

Berdasarkan prinsip responsibilitas pada pedoman GCG dimana peduli dengan masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar koperasi. Prinsip responsibilitas yang telah dilakukan oleh koperasi berkaitan dengan tanggungjawab sosial telah terwujud hanya saja tidak didukung dengan melestarikan lingkungan sekitar koperasi yang ada. Dari pengamatan dilapangan toko serba ada tidak begitu rame dari pembeli (masyarakat) dikarenakan banyak yang belum peduli dengan keberadaan koperasi tersebut dilain pihak banyak toko kompetitor daerah sekitar dan mini market dan *hyper mart* yang membuat toko serba ada tidak nampak keramaian.

4.4.5 Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Prinsip Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) merupakan prinsip yang menekankan pada perlakuan dan jaminan yang sama kepada seluruh anggota, baik yang merupakan simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan khusus (sukarela) yang dapat diambil kapan saja dengan tidak melibatkan unsur SARA dalam keanggotaan koperasi. Unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) dalam koperasi tidak dijelaskan pada Undang-undang namun lebih mengarah pada hak warga negara Indonesia sebagai anggota koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Dan setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat 1 dan 4 UU No. 25 Tahun 1992). Hal yang sama disampaikan dan diatur pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. : PER – 01 /MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN menurutnya Prinsip *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan) merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Pemahaman dari peneliti bahwa unsur SARA tidak diungkap pada tata kelola BUMN dimana keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan tidak diatur

didalamnya karena akan mempengaruhi keberlangsungan hidup pada perusahaan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh pengelola toko serba ada “*Jelas tidak ada unsur SARA, karena lembaga ini milik pemerintah yang tidak menonjolkan unsur tersebut, karena koperasi ini pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh anggota*”.

Dari kutipan tersebut menurut Arifin (2005) menyampaikan bahwa prinsip kewajaran lebih menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Dengan prinsip kewajaran keanggotaan koperasi tidak ada perlakuan secara khusus dan memiliki hak-hak yang sama pada setiap anggota koperasi. Pada pedoman pelaksanaan Prinsip *Fairness* menurut GCG yang diatur dalam pedoman KNKG menyatakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik. Dengan adanya prinsip yang sama berdasar hak dan kewajiban setiap anggota merupakan sumber daya manusia yang menjadi peran yang patut dihargai dalam perkembangan koperasi dalam pelopor pengelolaan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan koperasi dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada para anggota yang baik, dikarenakan kompetitor antara koperasi satu dengan yang lain saling berkompetisi memperoleh anggota yang loyal dalam perkembangan koperasi, dengan demikian Prinsip *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) pada GCG menurut KNKG memperoleh pendapat yang sama dimana pelaksanaan kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.

4.5 Penilaian aspek-aspek *Good Corporate Governance* pada Koperasi

Penilaian implementasi aspek GCG berdasarkan hasil angket kuisioner dan wawancara dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

- 1.) Penerapan prinsip Transparansi diperoleh nilai indeks 3,25 dapat terlaksana dengan baik. Transparansi pada laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan secara transparan disampaikan berkaitan segala aktivitas pengelolaan keuangan selama 1 periode (1 = satu tahun) dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.

- 2.) Implementasi penerapan Independensi diperoleh nilai indeks 3,25 dalam pengelolaannya dapat dikatakan telah dikelola dengan baik. Independensi dalam membangun koperasi dihimpun melalui modal sendiri yang berasal dari anggota dengan pengembangan diri dari oleh dan untuk anggota dapat membiayai kebutuhan investasi dan mampu berkreasi dan berinovasi dalam persaingan antar koperasi serta dapat melayani masyarakat dengan baik.
- 3.) Implementasi penerapan Akuntabilitas diperoleh nilai indeks 3,00 dalam tata kelola koperasi dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya AD/ART disertai visi, misi aktivitas yang dilakukan koperasi pengelolaan dan perkembangan koperasi dapat terus meningkatkan diri dalam usaha dan pengembangannya.
- 4.) Implementasi penerapan Responsibilitas diperoleh dengan nilai indeks 2,71 dalam tata kelola koperasi dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Prinsip responsibilitas dilakukan dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan dimana peraturan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan aturan AD/ART menjadi bagian dalam pengelolaan perkembangan koperasi dengan yang telah menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas pengurus maupun anggota koperasi.
- 5.) Implementasi penerapan Fairness (kewajaran dan kesetaraan) diperoleh nilai indeks dalam pengelolaan koperasi sejumlah 3,43 dengan nilai tersebut dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Pengelolaan dan keanggotaan koperasi tidak membedakan unsur suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

BAB V **PENUTUP**

a. Kesimpulan

1. *Good Corporate Governance* koperasi pada Koperasi karyawan kopertis wilayah 7 telah dilaksanakan dengan baik dengan uraian diantaranya :
 - a.) Prinsip transparansi dilakukan secara transparan dan disampaikan oleh pengurus berkaitan dengan pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara independen selama 8 tahun belakang ini.
 - b.) Prinsip independensi terlaksana dengan secara baik dengan kemandirian pengelolaan koperasi yang dihimpun oleh anggota menjadikan modal awal dalam menginvestasikan dananya untuk membangun koperasi pegawai dapat mendukung kesejahteraan anggota
 - c.) Dalam pengelolaan prinsip akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik, dengan aturan yang telah ada baik AD/ART yang didalamnya meliputi visi dan misi dan mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 membuktikan bahwa pertanggungjawaban terhadap aturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik dan dapat dikondisikan sesuai dengan kondisi koperasi.
 - d.) Pengelolaan prinsip responsibilitas secara sistematis mengacu pada Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan tiap tahun koperasi melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan tarif pajak yang berlaku untuk pada koperasi.
 - e.) Tidak adanya unsur SARA dalam pengelolaan koperasi maupun dalam keanggotaan.

b. Saran

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan angket kuisioner implementasi *Good Corporate Governance* pada koperasi pegawai kopertis wilayah 7, maka peneliti dapat mengajukan saran yang sekiranya dapat dikembangkan dikemudian hari guna menjadi bahan pengembangan koperasi dimasa yang akan datang diantaranya :

- a.) Pentingnya prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan koperasi guna menciptakan koperasi yang memiliki standar mutu setara perusahaan dengan income yang besar.
- b.) Pengelolaan koperasi yang berdasarkan *Good Corporate Governance* diperlukan integritas yang tinggi dengan memiliki etika yang sebagai acuan bagi koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha termasuk didalamnya etika pemangku kepentingan guna menghindari *conflict of interest*.
- c.) Adanya pedoman perilaku yang menjadi panduan etika dalam berbisnis dalam lingkungan koperasi yang diberlakukan untuk semua anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, Jhon E dan Siswanto Sutojo. 2008. *Good Corporate Governance*. Jakarta. Damar
- Ahmadi, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Univ. Negeri Malang
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Ed. Revisi VI. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip GCG pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Universitas Diponegoro.
- Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd. link website : https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi (diakses Tgl. 27-Feb-2016 : pk 13.00)
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu Sosial*. Jakarta.Kencana Prenama Media Group
- BPS. 2016. *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi*, 2006-2014. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1314> (diakses tgl. 26 Februari 2016 : pk. 07.56)
- Diknas, 2008, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional
- Ferlinda,Ekky Dwi, Heru Ribawanto, Siswidiyanto. 2008. *Implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan* (studi pada PT. Telkom Banyuwangi). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. NO. 4. Hal.22-30. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang
- Iskandar dan Suryono. 2015. *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Pengendalian Internal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 4. No. 10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewarausahaan. Vol.8.No. 1.Maret. Universitas Kristen Petra

- Purno, Bambang Listyo. 2013. *Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan.* (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011)
- Puspitasari dan Ludigdo. 2014. *Good Governance of Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur.* Universitas Brawijaya
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M .KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill
- Purno, Bambang Listyo. 2013. *Pengaruh Mekanisme Good Governance terhadap Kinerja Perbankan* (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2009 – 2011). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Rakhmat Agung dan Erwin Saraswati. 2013. *Good Corporate Governance (GCG) sebagai prinsip implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR).* FEB UB
- Retno, Reny Dyah dan Denies Priantinah. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility terhadap nilai perusahaan* (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). Jurnal Nominal/Volume 1 No. 1/ Tahun 2012. FE Universitas Negeri Yogyakarta
- Sudarto. 2015. *Pembinaan koperasi, peran pemerintah perlu dipertajam.* <http://sultengpost.com/?p=10004> (diakses tgl. 26 Februasi 2016 : pk. 08.00)
- SBY. 2013. *Dengan Koperasi, Ekonomi akan Tumbuh Adil dan Merata.* <http://hot.detik.com/read/2013/07/12/185931/2301367/4/sby-dengan-koperasi-ekonomi-akan-tumbuh-adil-dan-merata> (Diakses tgl. 26 Feb 2016 : pk. 8.32)
- _____. 2014. *SBY Diberi Gelar Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi.* <http://news.detik.com/berita/2638137/sby-diberi-gelar-bapak-penggerak-pembangunan-koperasi> (diakses tgl. 26 Feb 2016 : pk. 8.30)
- Supriyanto. 2015. *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam.* Andi Offset
- Santosa, Djohari. 2008. *Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan Publik diIndonesia.* Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15 April. FH UII Yogyakarya

- Subagyo, Ahmad. 2016. *Koperasi diantara LKD dan Laku Pandai.* <http://www.ahmadsubagyo.com/wp-content/uploads/2016/01/artikel-koperasi-info-bank-jan-2016-p.2.pdf> (diakses tgl. 1 Maret 2016 :pk. 20.00)
- Subagyo, Ahmad. 2016. *Menuju Tata Kelola Koperasi yang berkelanjutan.* <http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/users/1/slides%20tata%20kelola%20koperasi%20berkelanjutan.pdf> (Diakses Tgl. 1 Maret 2016 : Pk. 20.05)
- Susanto, Bob. 2015. *Koperasi menurut pada ahli.* <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (diakses tgl. 1 Maret 2016 : pk. 15.00)
- Schwarz, Eric. *Memenangkan Persaingan Bisnis dalam memberdayakan Solusi Teknologi Informasi.* <http://chiez.blogstudent.mb.ipb.ac.id/author/chiez/> (Diakses Tgl. 29 Mei 2016 : Pk.00.10)
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surakarta. UNS
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta
- Sugiyanto. 2013. *Jati Diri Koperasi Indonesia, Proceding seminar dan diskusi nasional.* Institut Koperasi Indonesia
- Tejo, Nurseto. 2008. *Prinsip-prinsip dan penjenisan koperasi.* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Prospek Perkembangan Koperasi diIndonesia kedepan : Masih relevankah koperasi didalam era modernisasi ekonomi.* Pusat Studi Industri dan UKM. Jakarta. Universitas Trisakti
- Tadikapurry, Violetta Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank X, Tbk.* Kanwil X. Universitas Hasanuddin
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Wati, Like Monisa. 2012. *Pengaruh praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan diBursa Efek Indonesia.* Jurnal Menejemen. Vol.1-No.1.September 2012. Universitas Negeri Padang

LAMPIRAN 1.

Susunan Organisasi Tim Peneliti

Ketua Tim

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. Nama Lengkap | : | Tony Soebijono, S.E.,S.H., M.Ak. |
| b. Jenis Kelamian | : | Pria |
| c. NIP | : | 050521 |
| d. Displin Ilmu | : | Akuntansi |
| e. Golongan/Pangkat | : | Asisten Ahli |
| f. Jabatan
Fungsional/Struktural | : | Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi |
| g. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi/Akuntansi |
| h. Waktu untuk Penelitian
ini | : | 12 jam/minggu |

Anggota Tim. 1

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. Nama Lengkap | : | Lilis Binawati |
| b. Jenis Kelamian | : | Wanita |
| c. NIP | : | 050508 |
| d. Displin Ilmu | : | Akuntansi |
| e. Golongan/Pangkat | : | Asisten Ahli |
| f. Jabatan
Fungsional/Struktural | : | Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi |
| g. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi/Akuntansi |
| h. Waktu untuk
Penelitian ini | : | 12 jam/minggu |

Anggota Tim. 2

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. Nama Lengkap | : | Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA. |
| b. Jenis Kelamian | : | Pria |
| c. NIP | : | 150848 |
| d. Displin Ilmu | : | Akuntansi |
| e. Golongan/Pangkat | : | Asisten Ahli |
| f. Jabatan
Fungsional/Struktural | : | Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi |
| g. Fakultas/Jurusan | : | Ekonomi/Akuntansi |
| h. Waktu untuk Penelitian ini | : | 12 jam/minggu |

LAMPIRAN 2.**BIODATA KETUA dan ANGGOTA TIM PENGUSUL****Biodata Ketua Tim Peneliti****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengangelar)	Tony Soebijono, S.E., S.H., M.Ak.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	050521
5	NIDN	07031273302
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 03 Desember 1973
7	Alamat Rumah	Puri Mas Gianyar C4 No. 29-30 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks/HP	031-5037961/-0857 3333 6361
9	Alamat Kantor	Jalan Raya KedungBaruk 98, Surabaya
10	Nomor Telpon/Faks	0318721731/0318710218
11	Alamat e-mail	tonys@stikom.edu
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= +/- 30 orang ; S-2= - orang ; S-3= - orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	Manajemen Produksi
		Sistem Informasi Akuntansi
		Administrasi Bisnis (Akuntansi)
		Hukum Bisnis
		Manajemen Sumber Daya Manusia

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Surabaya	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Universitas Surabaya
Bidang Ilmu	Manajemen Sumber Daya	Ilmu Hukum	Akuntansi
Tahun Masuk-Lulus	1992 - 1998	1998 - 2002	2009 - 2011
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Perbedaan Kepuasan Kerja Antara Shift Kerja I, Shift Kerja II Dan Shift Kerja III Pada Karyawan Operasional Produksi PT Kediri Wood Industri Di Kediri	Tinjauan Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja	Audit Sistem Informasi Untuk Menilai Domain <i>Deliver And Support</i> Dalam <i>IT Governance</i> Dengan Menggunakan <i>Framework Cobit</i>
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Jhony Rusdianto, M.M	J. Subekti, S.H., M.M.	Gregorius Rudy Antonio, S.E., M.Sc., Ak., CPA., QIA.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (JutaRp)
1	2011	Perbedaan Kepuasan Kerja antara Shift kerja I, Shift Kerja II, dan Shift Kerja III pada Karyawan Operasional	Dosen Pemula	-
2	2012	Perancangan Instrumen Pengukuran <i>Risk Assessment</i> Sebagai Strategi Mitigasi Resiko (Studi pada Toko Online "X" di Surabaya)	Hibah Internal	-
3	2012	Perencanaan Strategis SI/TI Pada Industri Pengolahan Susu (Studi Kasus: Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung - Pasuruan)	Hibah Internal	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JENIS/NAMA KEGIATAN	PERAN
1	2011	Pelatihan Komputer bagi siswa SLB Al Azhar Tropodo	Trainer
2	2010 - 2012	Program <i>Cooperative Education</i> di UMKM	Pendamping
3	2012	Talkshow di Radio MDC FM	Narasumber
4	2012	IbM bagi sanggar merah merdeka Surabaya	Ketua IbM
5	2014	Pemanfaatan Sistem Informasi Umat pada Gereja Roh Kudus Surabaya	Anggota
6	2015	IbM Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Terapi Autisme Pada Sekolah Inklusi	Anggota

E. Pengalaman Seminar dan Jurnal Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	NAMA PERTEMUAN ILMIAH	JUDUL ARTIKEL ILMIAH	PENYELEN GGARA
1	2011	Seminar Nasional Sistem & Teknologi Informasi (SNASTI)	Perbedaan Kepuasan Kerja antara Shift Kerja I, Shift Kerja II, dan Shift Kerja III pada Karyawan Operasional	STMIK Surabaya

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata yang saya buat sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Surabaya, 16 Desember 2016

Tony Soebijono,S.E.,S.H.,M.Ak

BIO DATA ANGGOTA.1 PENELITI

A. IDENTITAS DIRI

a.	Nama Lengkap dan Gelar	:	Lilis Binawati,S.E.,M.Ak
b.	Tempat & Tanggal Lahir	:	Blitar, 20 Mei 1969
c.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
d.	Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi/Akuntansi
e.	Golongan Pangkat dan NIP	:	Asisten Ahli/3B; NIP.050508
f.	Bidang Keahlian	:	Akuntansi
g.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kedung Baruk No. 98 Surabaya 60298
h.	Telepon/Faksimile	:	031-8721731 / 031-8720218
i.	Email	:	lilis@stikom.edu
j.	Alamat Rumah/HP	:	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Universitas Surabaya	
Bidang Ilmu	Akuntansi	Magister Akuntansi	
Tahun Masuk-Lulus	1988 – 1992	2008 - 2010	
Judul Skripsi / Thesis / Desertasi	Audit Terhadap Kelayakan Penilaian dan Penyajian Pos Persediaan Dalam Laporan Keuangan PT Bintang Tunggal Sejati Sidoarjo	Penerapan Activity Based Costing Untuk Meningkatkan Keakuratan Perhitungan Beban Pokok Program Studi Perguruan Tinggi X	
Nama Pembimbing/ Promotor	Dra. Adiyati Tri Hastoeti, Ak., M.M., CA.	Dr. Yie Ke Feliana, S.E., M.Com., Ak., CPA., CFP., CA.	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1				

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
2			

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata yang saya buat sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula

Surabaya, 16 Desember 2016

Lilis Binawati,S.E.,M.Ak

BIO DATA ANGGOTA.2 PENELITI

G. IDENTITAS DIRI

a.	Nama Lengkap dan Gelar	:	Martinus Sony Erstiawan,SE.MSA
b.	Tempat & Tanggal Lahir	:	UjungPandang, 10 Maret 1979
c.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
d.	Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi/Akuntansi
e.	Golongan Pangkat dan NIP	:	Asisten Ahli/3B; NIP.150848
f.	Bidang Keahlian	:	Akuntansi
g.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kedung Baruk No. 98 Surabaya 60298
h.	Telepon/Faksimile	:	031-8721731 / 031-8720218
i.	Email	:	<u>martinus@stikom.edu</u>
j.	Alamat Rumah/HP	:	Jl. Gayung Kebon Sari II No. 54 Surabaya

H. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Bhayangkara Surabaya	STIESIA Surabaya	
Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi	
Tahun Masuk-Lulus	1997 – 2001	2009 - 2011	
Judul Skripsi / Thesis / Desertasi	Analisa Auditing Atas Siklus Pengajian Dan Personalia Untuk Menigkatkan Mutu Pengendalian Intern (Studi Kasus Production Training Centre Surabaya)	Keberlanjutan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan Akuntansi (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Surabaya)	
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Drs. Ec. M. Mamak Balafif, M.Ec	1. Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak 2. Drs.Ikhsan Budi Riharjo,M.Si.,Ak, CA	1.

I. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Keberlanjutan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Akuntansi pada Perguruan Tinggi Di Surabaya (Pendekatan Research and Development)	Kopertis Wilayah VIII	10.
2	2013	Penilaian Implementasi Good Corporate Governance pada BUMN Indonesia Sektor PTPN	DP2M	10.

J. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2014	Pendampingan audit keuangan internal Sekolah dibawah naungan Yayasan Yohanes Gabriel		

K. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
2			

L. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Keberlanjutan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Mutu	UKDC

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata yang saya buat sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Surabaya, 16 Desember 2016

Martinus Sony Erstiawan,S.E.,M.S.A